

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Kemandekan dalam proses pendidikan akan berakibat terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan. Pendidikan menjadi alat dan tolok ukur kemajuan dari bangsa Indonesia. Visi-Misi ini sudah jauh-jauh hari dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang di antaranya menyatakan bahwa “pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹ Dengan demikian, pendidikan yang dijalankan tidak hanya sebatas menyentuh pada aspek intelektual (IQ) semata, melainkan harus menyentuh pelbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya sebatas pada suatu proses transfer atau perpindahan ilmu dari pendidik ke peserta didik, melainkan suatu proses yang kompleks untuk membentuk karakter kepribadian manusia yang merdeka, kreatif dan inovatif. Pendidikan harus membantu individu berintegrasi secara baik dan berpartisipasi secara efektif di dalam kehidupan bermasyarakat.² Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pribadi yang

¹“*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*” Jilid 1 (Jakarta: CV CITRA MANDIRI, 2003), hlm. 460.

² Bernard Raho, *Sosiologi: Sebuah Pengantar* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2008), hlm. 152.

memiliki kecerdasan, intelektual, kecerdasan relasional (kecerdasan sosial), kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.³

Sistem pendidikan yang baik akan berdampak pada pembangunan nasional. Pembangunan sistem pendidikan akan menjadi sia-sia jika terjadi ketidaksinambungan dengan pembangunan nasional. Dengan demikian supaya keduanya tidak terjadi tumpang tindih, mesti terjalin hubungan yang berkesinambungan antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional. Baik kemajuan maupun kemunduran bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, sebaliknya pendidikan yang keliru akan menghasilkan manusia-manusia yang tidak berkualitas, yang berpotensi merusak roda pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki arah dan tujuan yang jelas demi menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas.

Pendidikan yang baik dan terarah adalah pendidikan yang memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Pendidikan yang mengikuti spirit UUD 1945 dan Pancasila memiliki efektifitas dalam menghasilkan serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyentuh bukan saja aspek akademis, melainkan juga aspek humanis dari setiap orang. Dengan menyentuh aspek akademis dan humanis, idealisme pendidikan sebagai pilar utama yang menopang sendi-sendi kehidupan manusia dalam pelbagai dimensinya turut menentukan pula perjalanan hidup manusia. Pendidikan berusaha membantu hakikat manusia untuk meraih kedewasaannya, yakni menjadi pribadi yang memiliki integritas emosi, intelek, dan perbuatan.⁴ Untuk mencapai model pendidikan seperti ini, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban “untuk memajukan kesejahteraan umum” dan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 harus dilaksanakan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Kewajiban

³ *Ibid.*

⁴ H. Oong Komar, *Filsafat Pendidikan Nonformal* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2006), hlm. 17.

ini dirinci lebih lanjut dalam pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, dan karena itu pemerintah wajib “mengusahakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.⁵

Di Indonesia, pendidikan masih merupakan sebuah persoalan yang belum tuntas. Berbicara tentang tantangan dan permasalahan pendidikan di Indonesia memasuki milenium ketiga berarti berbicara tentang pendidikan kita dewasa ini dalam perspektif masa depan. Pendidikan sesungguhnya selalu bersangkutan paut dengan masa depan sebab, sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Pasal 1 UUNP, No. 2, 1989, pendidikan pada dasarnya adalah “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.”⁶ Namun dalam kenyataannya, lembaga pendidikan, khususnya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terkadang kurang mampu mengikuti dan menanggapi arus perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat. Kiblat pendidikan formal yang memprihatinkan ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan, antara lain persoalan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang tidak bisa secara universal diakses oleh semua warga negara Indonesia.⁷

Indonesia adalah negara dunia ketiga yang sedang melakukan pembangunan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam perjalannya timbul pelbagai penyimpangan dan masalah di dalam proses perealisasiannya. Pendidikan yang diselenggarakan perlahan keluar dari jalurnya. Amanat Undang-Undang untuk mencerdaskan manusia seutuhnya seakan dikesampingkan.

Persoalannya adalah kebijakan pendidikan sudah direduksi pada pandangan yang bercorak instrumental tentang pendidikan, di mana manusia dijadikan sebagai

⁵ Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal 31.

⁶ H. Oong Komar, *op. cit.*, hlm.31.

⁷ *Ibid.*

sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;⁸ meskipun sebetulnya pendidikan adalah suatu proses yang kompleks yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan manusia Indonesia seutuhnya dari pelbagai aspek kehidupan. Dengan melihat pendidikan sebagai sesuatu yang berciri instrumental, maka sebetulnya pendidikan hanyalah sebuah sarana untuk membebaskan manusia. Dengan demikian, seluruh kerangka dan strategi pendidikan berorientasi pada pembebasan diri manusia dengan meningkatkan produksi demi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana kita menginvestasi sesuatu dalam dunia pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi pertama kali dikemukakan oleh Theodore W Schultz pada tahun 1960 yang berjudul *investment in human capital* dalam *forum American Economic Association*.⁹ Pesan yang disampaikan adalah “proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu bentuk investasi”. Investasi mengandaikan adanya hubungan antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berorientasi pada pembebasan diri manusia dari penderitaan serta peningkatan kualitas manusia. Dengan demikian, dimensi ekonomi dilihat sebagai tolok ukur untuk menimbang dan menentukan kesejahteraan serta kemakmuran dari suatu negara. Demi mewujudkan hal ini, maka dunia pendidikan menjadi instrumen dan locus yang mapan untuk mempersiapkan manusia yang berkualitas demi pertumbuhan ekonomi yang baik, sebab pertumbuhan ekonomi mengarah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, seluruh kerangka acuan pendidikan berorientasi pada persiapan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan perekonomian yang dinilai perlahan mengalami keterpurukan.¹⁰ Dengan kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat, maka pendidikan menjadi faktor yang sangat penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Dunia

⁸ Ignas Klden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 85-104., dalam: Dr. Mathias Daven, *Pendekatan Kapabilitas dalam Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 2.

⁹ Zainil Arafin, “Relasi Ekonomi dan Pendidikan” <http://www.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 20 Oktober 2023.

¹⁰ Apriyanti Widiyansyah, “Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Cakrawala*, 17:2 (Jakarta: Desember 2017), hlm. 207-215.

pendidikan mempersiapkan serta menghasilkan kualitas-kualitas sumber daya manusia yang semakin profesional dan progresif baik untuk sektor industri maupun sektor pertanian.¹¹

Pandangan yang melihat pendidikan sebagai sesuatu yang berciri instrumental bukan tidak membawa soal. Justru dengan pandangan ini, pendidikan meletakkan serta memposisikan manusia sebagai sarana untuk mendorong serentak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, proses penyelenggaraan pendidikan diframing untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan perekonomian. Manusia dipersiapkan untuk suatu tujuan di luar dirinya yakni perekonomian. Dengan melihat dan menilai serta menghargai nilai instrumental dari pendidikan, yakni sebagai sarana untuk mempersiapkan kualitas-kualitas sumber daya manusia yang mapan sebetulnya tidak salah juga. Namun yang menjadi persoalannya terletak pada fakta bahwa dengan melihat pendidikan secara instrumental lantas mengabaikan dimensi lain dari pendidikan itu sendiri.

Pengakuan dan penghargaan akan nilai instrumental dari pendidikan serta pengabaian akan hal-hal yang bersifat non instrumental dari pendidikan mengantar kita pada satu gambaran tentang manusia sebagai *homo oeconomicus*.¹² *Homo oeconomicus* adalah gambaran tentang manusia sebagai subyek yang mempersiapkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk suatu tujuan tertentu. Seluruh sumber daya yang dimilikinya dikerahkan dan dikonversikan untuk mencapai suatu tujuan, tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya yakni dimensi nilai. Atau dengan kata lain, *homo oeconomicus* adalah gambaran tentang manusia yang hanya bertindak murni atas dasar rasionalitas tujuan, bukan rasionalitas nilai.¹³ Hal ini berdampak pada tindakan keseharian. Seorang manusia ekonomi dalam tindakannya selalu mengorientasikan dirinya pada suatu tujuan yang ingin dicapai, cara untuk mencapainya serta akibat-akibatnya, sedangkan pedoman normatif tidak diutamakan. Hukum yang berlaku adalah hukum untung-rugi. Yang diutamakan adalah pencapaian tujuan berupa manfaat sebesar-besarnya. Dalam merealisasikan cita-cita

¹¹ *Ibid.*

¹² Ignas Kleden., Dalam: Mathias Daven, *op, cit.*, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*

ini, orang mengesampingkan aspek normatif yang berlaku dan fokus pada tujuan yang mau dicapai. Tak heran bahwa dalam pemilihan cara yang ditempuh hanya mengedepankan pertimbangan biaya dan efisiensi, serentak mengesampingkan dimensi nilai etis.

Fenomena ini semakin kuat dengan munculnya globalisasi. Kehidupan di dunia semakin kompleks dan saling *interdependence*. Ketergantungan manusia seringkali diasosiasikan dengan globalisasi, sebab globalisasi telah membuka sekat-sekat pembatas antar manusia.¹⁴ Apapun yang dialami oleh satu bangsa akan segera diketahui oleh bangsa lain. Semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pelbagai fenomena yang terjadi berkat globalisasi. Namun mesti diakui bahwa perkembangan globalisasi tidak luput dari dimensi ekonomi. Bahkan dimensi ekonomi telah terisolasi dari bidang sosial kemasyarakatan, sebab ekonomi telah memiliki tujuan di dalam dirinya. Akibatnya bahwa ekonomi bukan lagi dilihat sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan pokok manusia, melainkan lebih dilihat sebagai sesuatu yang memiliki tujuannya tersendiri. Dengan demikian, seluruh model kebijakan pembangunan termasuk dimensi pendidikan berorientasi pada penunjang pertumbuhan ekonomi. Maka seluruh kerangka acuan dan strategi pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan singkat di atas, sedikit banyak mengafirmasi bahwa kemunculan globalisasi pertama-tama adalah fenomena ekonomi. Virus ekonomi inilah yang menjadi faktor perkembangan dan pertumbuhan globalisasi. Globalisasi sebetulnya adalah wadah yang telah berjasa dalam menyebarkan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme adalah sistem yang menempatkan ekonomi terpisah dari etika.¹⁵ Memosisikan ekonomi yang terpisah dari etika sebetulnya mengafirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai tolok ukur untuk menimbang dan menentukan keberhasilan pembangunan. Bahwasannya keberhasilan suatu pembangunan tergantung dari pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pemisahan ekonomi dari etika

¹⁴ Yuliana Setyawati et al., "Imbas Negatif Globalisasi Terhadap Pendidikan di Indonesia" *Jurnal Kewarganegaraan*, 5:2 (Surakarta: Desember 2021), hlm. 306.

¹⁵ Mathias Daven, *op. cit.*, hlm. 5.

telah mendorong manusia untuk mengejar sesuatu yang berguna untuk dirinya, tanpa mempertimbangkan dimensi etik-normatif.

Globalisasi ekonomi memiliki sumbangsi yang tidak sedikit terhadap proses pendidikan. Pendidikan bukan lagi dilihat sebagai dimensi untuk mencerdaskan serta mengembangkan manusia seutuhnya dalam seluruh dimensi kehidupannya, melainkan lebih dilihat sebagai sesuatu yang berciri instrumental, di mana manusia dijadikan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menempatkan pendidikan dalam kerangka instrumental, maka sebetulnya pendidikan hanya dilihat sebagai sarana untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi ekonomi telah membuat strategi yang baru dalam dunia pendidikan, yakni mempersiapkan manusia untuk pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi, sebab pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, ada perbedaan antara dimensi ekonomi dan dimensi non ekonomi dalam pendidikan. Dimensi ekonomi menjadi sasaran utama dari setiap penyelenggaraan pendidikan, yakni mempersiapkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi, sementara dimensi non ekonomi semacam “ornamen tambahan”¹⁶ yang boleh jadi hanya dilihat sebagai pelengkap.

Dengan mengafirmasi bahwa globalisasi dalam bentuknya telah bertumbuh dan berkembang melalui ekonomi, maka seluruh bangunan dan pandangan tentang pendidikan berubah secara fundamental. Seluruh model penyelenggaraan pendidikan bukan lagi dilihat sebagai wadah untuk mengembangkan manusia seutuhnya dalam pelbagai aspek kehidupannya, serta memperluas khazanah pengetahuan dan sarana untuk mencapai kebenaran, melainkan pendidikan terutama di arahkan untuk meningkatkan produksi demi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini berimbas pada pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar semakin bersifat fungsional dan semakin kurang rasional kritis.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 167.

Hal ini tercermin dalam pendekatan teknokrasi. Jika masalah pendidikan dan pengajaran di sekolah direduksi pada masalah teknis semata, maka sebetulnya pendidikan yang berlangsung hanya berkutat dengan masalah kurikulum, buku ajar, mekanisme ujian, mekanisme pemberian nilai terhadap para peserta didik. Sementara dimensi fundamental dari pendidikan adalah dimensi etis-politis, yakni menyangkut pertanyaan apakah pendidikan nasional bertujuan menciptakan manusia dewasa, berpengetahuan cukup, dengan otonomi pribadi yang sanggup berpikir dan memutuskan sendiri.¹⁸ Masalah teknis hanya berkutat seputar pertanyaan “apa yang dapat saya lakukan”? sedangkan masalah politis lebih kepada bagaimana seorang peserta didik mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mengkonversikan pengetahuannya.

Dari uraian singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk melihat dan mendalami sejauh mana globalisasi ekonomi dengan segala tawarannya berpengaruh pada proses pendidikan di bawah judul: **ANALISIS KRITIS PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PROSES PENDIDIKAN DI INDONESIA**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah: Sejauh mana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap proses pendidikan di Indonesia? Masalah pokok tersebut akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa itu pendidikan?
2. Apa itu globalisasi ekonomi?
3. Apa pengaruh globalisasi ekonomi terhadap proses pendidikan di Indonesia?

¹⁸ Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan* (Jakarta: Yayasan INDONESIA TERATA, 2004), hlm. 5-6.

1.3. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan utama penulisan karya ilmiah ini.

Pertama, tujuan umum. Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini adalah untuk melihat dan menganalisis sejauh mana globalisasi ekonomi berpengaruh terhadap proses pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, karya ini juga semacam upaya untuk menyadarkan kita supaya mengambil bagian dalam pendidikan. Persoalan yang selalu mewarnai panggung pendidikan Indonesia merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, karya ini bisa membangkitkan komitmen dan tanggung jawab kita dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari karya ilmiah ini adalah sebagai salah satu prasyarat mencapai gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Selain itu, karya ilmiah ini merupakan salah satu media bagi penulis untuk menuangkan gagasan-gagasan seputar masalah sosial dan politik di Indonesia terutama sistem pendidikan nasional.

1.4. METODE PENULISAN

Dalam proses menyelesaikan karya ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi/penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis data-data primer dan sekunder dari buku, majalah, jurnal-jurnal akademik, koran dan beberapa media *online*. Melalui pelbagai sumber yang ada, penulis berusaha untuk memahami rentetan persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, mengkajinya secara mendalam dan membuat jalan pemecahan atas pelbagai persoalan tersebut.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah ini terdiri dari 5 Bab. Pada Bab I berisikan pendahuluan, yang memuat latar belakang pemilihan judul ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari

tulisan ini, metode yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, pendidikan. Pada bab ini, penulis akan mengulas seputar dunia pendidikan dan kiprah dunia pendidikan di tanah air.

Bab III: globalisasi ekonomi. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan serta menganalisis globalisasi sebagai fenomena ekonomi. Bahwa globalisasi pertama-tama adalah fenomena ekonomi, yakni sarana untuk menyebarkan ekonomi kapitalisme.

Bab IV: globalisasi ekonomi dan pendidikan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menganalisis secara intensif sejauh mana globalisasi ekonomi membawa pengaruh bagi kiprah dunia pendidikan.

Akhirnya pada Bab IV, yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya, dan beberapa saran sebagai bentuk bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan dan dalam menyelenggarakan pendidikan.